

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN EKONOMI DAN TINGKAT KEMISKINAN DI KEPULAUAN NUSA TENGGARA

I Putu Nata Mahesa Putra ¹

I Nyoman Mahaendra Yasa ²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan masalah yang telah menjadi agenda wajib bagi semua Negara untuk diatasi dengan berbagai macam solusi. Disparitas kemiskinan antar provinsi di Kepulauan Nusa Tenggara tahun 2019 menunjukkan jarak yang cukup jauh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan di kepulauan Nusa Tenggara. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis jalur (Path Analysis). Hasil dari penelitian ini yaitu Upah Minimum Regional, Tingkat Pendidikan, dan Tingkat Kesehatan berpengaruh langsung positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Upah minimum regional, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh langsung negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di wilayah kepulauan Nusa Tenggara. Tingkat Pendidikan berpengaruh tidak langsung terhadap tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi sehingga, pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening. Upah minimum regional dan tingkat kesehatan tidak berpengaruh tidak langsung terhadap tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan pertumbuhan ekonomi bukan sebagai variabel mediasi.

Kata Kunci: *pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, UMR, tingkat pendidikan, tingkat Kesehatan*

ABSTRACT

Poverty is a problem that has become a matter for all countries be overcome with a variety of solutions. The poverty between provinces in Nusa Tenggara Islands in 2019 shows considerable distance. This study to analyze factors influence economic growth and poverty rates in the Nusa Tenggara islands. Analysis technique used path analysis. The results of this study are Regional Minimum Wages, Education Level, and Health Level have a positive significant effect on economic growth. Regional minimum wages, education levels, health levels, and economic growth have a negative significant direct effect on poverty levels in the Nusa Tenggara archipelago. Education level has an indirect effect on poverty levels through economic growth so that economic growth is an intervening variable. Regional minimum wages and health levels do not have an indirect effect on poverty levels through economic growth, as indicated by economic growth, not as a mediating variable.

Keywords: economic growth, poverty level, UMR, education level, health level

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah yang telah menjadi agenda wajib bagi semua Negara untuk diatasi dengan berbagai macam solusi (Anggadini, 2015). Baik negara maju ataupun negara berkembang memiliki tingkat kemiskinan, hanya saja negara berkembang pasti memiliki tingkat kemiskinan yang tergolong lebih tinggi. Pembangunan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dengan salah satu sarannya adalah menurunkan tingkat kemiskinan (Zainuddin, 2015). Kemiskinan merupakan salah satu masalah mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun. Di hampir semua negara berkembang, standar hidup dari sebagian besar penduduknya cenderung sangat rendah, jika dibandingkan dengan standar hidup orang-orang di negara kaya, atau dengan golongan elit di negara mereka sendiri. Standar hidup yang rendah tersebut terwujud salah satunya dalam bentuk tingkat pendapatan yang sangat rendah atau kemiskinan (Sari *dkk*, 2016).

Kepulauan Nusa Tenggara terdiri dari empat provinsi, diantaranya Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Provinsi Maluku. Jumlah tingkat kemiskinan di Kepulauan Nusa Tenggara perlu mendapat perhatian yang serius, karena walaupun terdapat trend menurun, jumlah tingkat kemiskinan masih berada pada angka yang tidak sedikit, terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Tingkat Kemiskinan Kepulauan Nusa Tenggara Tahun 2015-2019 (dalam%)

Provinsi	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Bali	4,66	4,22	4,27	4,07	3,88
NTB	18,31	17,88	17,64	17,64	16,35
NTT	21,70	21,52	21,53	21,37	21,45
Maluku	21,41	21,36	20,89	20,87	20,71
Indonesia	11,22	11,13	10,86	10,70	9,82

Sumber : *Badan Pusat Statistik Indonesia, 2019*

Berdasarkan Tabel 1 jumlah tingkat kemiskinan menunjukkan penurunan tiap tahun, namun penurunan jumlah tersebut masih berada pada angka yang cukup tinggi. Jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional, tingkat kemiskinan di hampir seluruh wilayah Kepulauan Nusa Tenggara berada pada tingkat yang lebih tinggi. Jumlah tingkat kemiskinan mempengaruhi perekonomian daerah, sehingga perlu diberikan atensi yang serius terhadap upaya-upaya pengentasan kemiskinan di Kepulauan Nusa Tenggara. Namun ketimpangan yang cukup jauh terjadi antara Bali dengan daerah Kepulauan Nusa Tenggara lainnya, hal ini diindikasikan karena pulau Bali merupakan salah satu wilayah yang pendapatan sektor pariwisatanya cukup tinggi sehingga tingkat kemiskinan di Bali jauh dibawah wilayah lainnya pada Kepulauan Nusa Tenggara.

Menurut Sari (2016), kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan, dan lain-lain. Kemiskinan bisa dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relative (Hartanto & Masjkuri, 2017). Kemiskinan absolut mengacu pada satu set standar yang konsisten, tidak terpengaruh oleh waktu dan tempat/negara. Sebuah contoh dari pengukuran absolut adalah persentase dari populasi yang makan dibawah jumlah yang cukup menopang kebutuhan tubuh manusia (kira kira 2000-2500 kalori per hari untuk laki laki dewasa). Berikut adalah beberapa potret kemiskinan di Kepulauan Nusa Tenggara (terlampir pada Gambar 1 Potret Kemiskinan).

Kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang kompleks, tidak bisa

didekati atau dipandang dari satu sisi saja, oleh karena itu diperlukan berbagai pendekatan untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan (Hartanto dan Masjkuri, 2017). Pada Tabel 1.1 kemiskinan di Kepulauan Nusa Tenggara berada pada level yang serius dengan presentase rata-rata di atas 10 persen, disisi lain terjadi ketimpangan yang cukup signifikan antara Provinsi Bali dengan Provinsi lainnya yang menyebabkan adanya gap antara tingkat kemiskinan yang memerlukan pengkajian lebih dalam pada sebuah penelitian. Berdasarkan gambar yang menunjukkan potret kemiskinan di Kepulauan Nusa Tenggara, mengindikasikan bahwa kesejahteraan masyarakat masih kurang, hal ini bisa diakibatkan oleh beberapa faktor, seperti Upah Minimum Regional (UMR) yang masih belum bisa mencukupi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.

Upah Minimum Regional (UMR) merupakan sebuah bentuk perlindungan pemerintah kepada buruh. Munculnya ketentuan upah minimum akan mendorong terjadinya distorsi dalam pasar tenaga kerja. Artinya dengan ketentuan upah minimum, maka buruh mempunyai kekuatan monopoli yang cenderung melindungi buruh yang telah bekerja dalam industri itu. Akan tetapi, fenomena sosial pada Kepulauan Nusa Tenggara yang menunjukkan bahwa mayoritas penduduk adalah petani yang tidak mendapatkan UMR sedangkan bagi masyarakat yang menerima UMR tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena jumlah anggota keluarga yang cukup banyak. Hal ini mengindikasikan bahwa UMR memiliki andil dalam mempengaruhi angka kemiskinan pada suatu daerah (Kuswantoro dan Dewi, 2016).

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kemiskinan adalah tingkat pendidikan. Pendidikan merupakan jendela ilmu pengetahuan, pendidikan adalah sebuah upaya yang memerlukan proses panjang agar seorang individu mampu berpikir dan bertanggung jawab setidaknya pada dirinya sendiri. Hal itu membuat posisi pendidikan dalam lingkaran kemiskinan menjadi penting. Pendidikan akan membuat seseorang memiliki kecakapan hidup untuk berpikir

kreatif dan inovatif sehingga akan membuka banyak opsi bagi masyarakat untuk mendapatkan penghasilan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, pendidikan saat ini masih digunakan sebagai salah satu kualifikasi dalam memperoleh pekerjaan, tentunya ini adalah kaitan nyata antara Pendidikan terhadap pengentasan kemiskinan (Anggraeni, 2017).

Selain Pendidikan, kesehatan juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kemiskinan. Pada hakikatnya antara kesehatan dan kemiskinan memiliki hubungan saling keterkaitan antara satu sama lain. Seseorang yang sehat secara jasmani dan rohani akan mampu untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga kaitannya dengan kemiskinan adalah dapat menekan biaya hidup, sedangkan di sisi lain, masyarakat yang terjebak dalam kemiskinan cenderung sulit untuk menerapkan hidup sehat karena keterbatasan pengetahuan dan juga keterbatasan biaya untuk mewujudkan hidup sehat yang hanya merupakan sebuah persepsi, karena untuk hidup sehat tidak harus tentang kaya dan miskin (Prananda *dkk*, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Kuswantoro dan Dewi (2016) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat apakah sebuah negara memiliki kesejahteraan yang baik atau tidak. Pertumbuhan ekonomi yang baik mengindikasikan tingkat kemiskinan yang rendah. Pertumbuhan ekonomi merupakan komponen penting bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan dalam daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan tingkat pendidikan penduduk suatu negara meningkat dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah pada umumnya ditunjukkan oleh laju dari PDRB. Laju pertumbuhan beberapa sektor di

setiap kabupaten/kota sangat beragam tergantung dari karakteristik sektor yang ada di kabupaten atau kota tersebut. Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota tersebut diharapkan mampu mengurangi tingkat kemiskinan di daerah tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Kuswantoro dan Dewi (2016) menyatakan bahwa Upah Minimum Regional (UMR) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di suatu daerah. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-226/Men/2000 mengubah penyebutan Upah Minimum Regional (UMR) Tingkat 1 jadi Upah Minimum Provinsi (UMP). Sehingga di Bali istilah UMR sudah diganti menjadi UMP. Sementara Upah Minimum Provinsi (UMP) adalah upah minimum yang nilainya berlaku di seluruh kabupaten/kota dalam suatu provinsi. Menurut Peraturan Gubernur Bali Nomor 87 Tahun 2018 tentang Upah Minimum Provinsi, besaran UMP Bali 2019 adalah Rp 2.297.968,70.

Secara umum UMP pada Provinsi Bali mengalami peningkatan setiap tahunnya hal ini diakibatkan karena terjadinya inflasi. Akan tetapi peningkatan nilai UMP masih belum sebanding dengan harga kebutuhan bahan-bahan pokok dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat, sehingga masyarakat yang memiliki pekerjaan dengan gaji setara UMP masih mengalami kesulitan dalam perekonomian (Kertiasih, 2017). Perkembangan UMR dari waktu ke waktu akan membawa dampak pada peningkatan pendapatan. Dengan demikian, keadaan tersebut akan dapat berakibat pada kemampuan para pekerja untuk meningkatkan pembelanjanya, dan pada akhirnya terjadi peningkatan ekonomi secara agregat, sehingga dapat dikatakan bahwa perkembangan UMR akan dapat berefek pada tingkat kemiskinan.

Penelitian yang dilakukan oleh Susanto, *dkk* (2017) menyatakan bahwa tingkat Pendidikan berpengaruh terhadap kemiskinan. Pendidikan yang lebih tinggi mengakibatkan produktifitas kerja lebih baik sehingga dampaknya akan memberikan penghasilan yang lebih besar (Anggraeni, 2017). Rendahnya

tingkat pendidikan menyebabkan pilihan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup menjadi terbatas sehingga pilihan yang diambilpun biasanya hanya mengandalkan tenaga sehingga penghasilan menjadi ikut rendah. Dari hasil penelitian Amalia (2017) menyatakan bahwa tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kemiskinan, karena Pendidikan adalah pionir dalam pembangunan masa depan suatu bangsa karena pendidikan yang berkualitas dapat ementukan kualitas pembangunan. Oleh karena itu, setiap manusia haruslah memperbaiki kualitas diriya melalui pendidikan agar tujuan pembangunan yang berkualitas dapat tercapai dengan baik. Berdasarkan data BPS (Amalia, 2017) sebesar 40,57 persen kepala rumah tangga miskin berpendidikan SD ke bawah, membuat penduduk miskin memiliki keterbatasan untuk mengembangkan diri.

Sektor pengeluaran pemerintah yang dianggap penting dalam meningkatkan kualitas SDM yaitu pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Alokasi anggaran fungsi pendidikan mencerminkan upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pendidikan dan sebagai salah satu upaya untuk memenuhi amanat konstitusi bahwa alokasi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari belanja negara (Kemenkeu RI, 2017). Pemerintah berkomitmen untuk memenuhi alokasi anggaran kesehatan sebesar 10 persen dari belanja negara, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Kemenkeu RI, 2017). Sedangkan pada sektor ekonomi yang memiliki cakupan luas menghabiskan hampir 70 persen dari APBN. Salah satu subsektor ekonomi yang menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah pertanian. Sejak dulu Indonesia dianggap sebagai negara agraris karena memiliki lahan pertanian yang luas dan sebagian besar masyarakat sekitar 32,8 persen bekerja di sektor ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Prananda *dkk* (2018) menyatakan bahwa tingkat kesehatan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap

pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Dasar dari aktivitas ekonomi adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat. Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah kualitas sumber daya manusia (SDM), diantaranya yaitu kesehatan. Kesehatan memainkan peran utama dalam membentuk kemampuan sebuah Negara berkembang untuk mendapatkan SDM yang berkualitas agar terciptanya ekonomi yang berkelanjutan. Dalam ekonomi berbasis pengetahuan global, kesehatan diakui sebagai bentuk investasi dalam modal manusia yang menghasilkan keuntungan ekonomi dan memberikan kontribusi untuk kekayaan masa depan bangsa. Kesehatan merupakan investasi yang sangat berguna bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia, kesehatan dianggap faktor penting yang mempengaruhi kualitas SDM. Negara yang mempunyai tingkat kesehatan yang rendah mempunyai tantangan yang lebih berat dalam mencapai pertumbuhan ekonomi, karena diasumsikan bahwa jika masyarakat sehat maka produksi akan meningkat dan akan berujung pada pertumbuhan ekonomi. Rata-rata penduduk yang mengalami keluhan kesehatan berada pada angka 30 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kesehatan masyarakat masih perlu untuk diperhatikan karena kesehatan merupakan modal awal untuk masyarakat dapat melakukan aktivitas dan dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat kemiskinan pada Kepulauan Nusa Tenggara merupakan sebuah fenomena yang kompleks, selain itu juga terdapat ketimpangan antara Provinsi Bali dengan provinsi lainnya dalam presentase kemiskinan yang menyebabkan sebuah gap yang menarik untuk di teliti lebih lanjut, maka diangkat penelitian dengan judul "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan di Kepulauan Nusa Tenggara".

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut; 1) Untuk menganalisis pengaruh Upah Minimum Regional, Tingkat pendidikan dan Tingkat kesehatan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kepulauan Nusa Tenggara. 2) Untuk menganalisis pengaruh Upah Minimum Regional, Tingkat Pendidikan, Tingkat kesehatan, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di Kepulauan Nusa Tenggara. 3) Untuk menganalisis pengaruh Upah Minimum Regional, Tingkat pendidikan dan Tingkat kesehatan secara tidak langsung terhadap Tingkat Kemiskinan melalui Pertumbuhan Ekonomi di Kepulauan Nusa Tenggara.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan cara menganalisis Tingkat Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi daerah Kepulauan Nusa Tenggara sebagai intervening dengan data Upah Minimum Regional, Tingkat pendidikan, dan Tingkat kesehatan. Kepulauan Nusa Tenggara terdiri dari empat provinsi, diantaranya Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Provinsi Maluku. Alasan pemilihan lokasi ini karena tingkat kemiskinan di Kepulauan Nusa Tenggara perlu mendapat perhatian yang serius, karena walaupun terdapat trend menurun, tingkat kemiskinan masih berada pada presentase yang tinggi, selain itu terjadi disparitas kemiskinan antar provinsi di Kepulauan Nusa Tenggara tahun 2019 Provinsi Bali memiliki tingkat kemiskinan 3,88 persen memiliki jarak yang jauh jika dibandingkan dengan Provinsi lainnya NTB 16,35 persen, NTT 21,45 persen dan Maluku 20,71 persen. Penelitian ini dilakukan di Kepulauan Nusa Tenggara yang terdiri dari empat Provinsi (Bali, NTB, NTT, dan Maluku) pada Tahun 2019, dan menggunakan data tahun sebelumnya, yaitu 2009 sampai dengan 2018 sebagai data penelitian yang akan diteliti untuk mendapatkan apa yang ingin dicari dalam penelitian ini. Teknik Analisis Data yaitu Analisis Statistik Deskriptif dan Analisis Jalur (*Path Analysis*). Hubungan variabel tersebut di jelaskan melalui kerangka konseptual yang ada.

Kemiskinan merupakan permasalahan mendasar yang paling sering ditemukan pada negara-negara berkembang. Tingkat kemiskinan pada sebuah daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor, karena kemiskinan berarti ketidakmampuan memenuhi

kebutuhan-kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari. Tingkat kemiskinan pada suatu daerah memiliki hubungan dengan keberadaan pendidikan pada daerah tersebut. Angka Pengangguran Terbuka mencerminkan penduduk yang memiliki usia produktif namun belum memiliki pekerjaan, sehingga biaya hidup mereka masih bergantung dengan orang lain. Hal ini semakin menambah tingkat kemiskinan. Selain itu, Upah Minimum Regional (UMR) juga mempengaruhi tingkat kemiskinan karena UMR merupakan acuan pemberian gaji untuk pekerja, semakin timpang antara UMR dengan harga barang-barang pokok semakin susah pekerja memenuhi kebutuhan hidup mereka sehingga tingkat kemiskinan semakin tinggi. Penelitian lainnya menyatakan bahwa Produk Domestik Bruto (Pendapatan Regional) yang merupakan sumber pendapatan suatu daerah mempengaruhi tingkat kemiskinan daerah tersebut.

Menurut Kuncoro (2006:67) upah atau gaji yang diterima seseorang sangat mempengaruhi taraf hidup orang tersebut. Berdasarkan hal itu, Upah Minimum Regional merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kemiskinan karena dengan UMR yang layak, akan dapat menekan angka kemiskinan masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Zainuddin (2015) menyatakan bahwa Upah Minimum Regional (UMR) berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini dikarenakan, tingginya kebutuhan sehari-hari dan harga kebutuhan pokok tidak dapat ditutupi oleh UMR sehingga masyarakat masih mengalami kesusahan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Harusnya penduduk yang sudah bekerja dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, akan tetapi dengan UMR yang rendah, hal itu tidak mungkin dapat terpenuhi. Selain itu, UMR juga berpotensi memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. UMR yang optimal cenderung memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya sehingga dengan adanya usaha pemenuhan kebutuhan maka pertumbuhan ekonomi suatu wilayah akan cenderung meningkat.

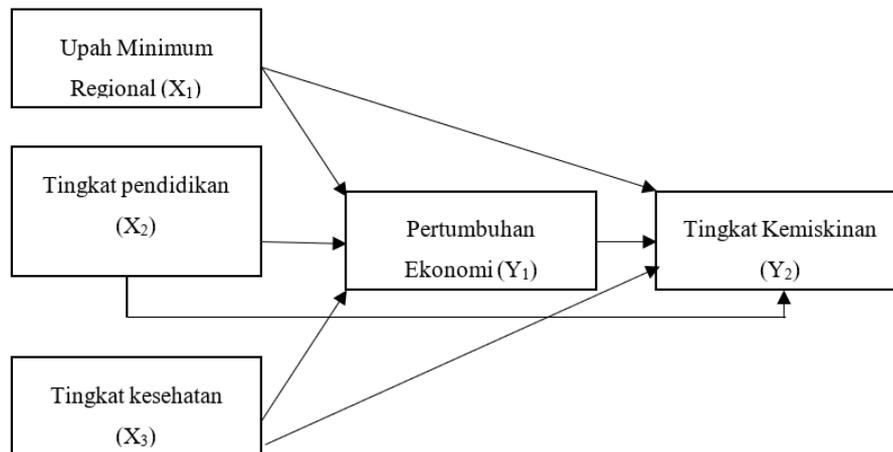
Kunaryo (2000:342) menyatakan bahwa pendidikan adalah salah satu jendela pemutus kemiskinan. Pendidikan adalah sebuah proses belajar seseorang dari tidak tahu menjadi tahu, sehingga Pendidikan akan memberikan

kesempatan bagi mereka yang mendapatkannya untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Azizah *dkk* (2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Semakin tinggi angka pengangguran terbuka, menandakan makin banyak penduduk usia produktif yang tidak memiliki pekerjaan. Penelitian senada yang dilakukan oleh Amalia (2017) menyatakan bahwa kemiskinan merupakan hal yang harus segera diatasi, dan memang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pendidikan dan pendapatan daerah. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Tingkat Pendidikan yang optimal memberikan peluang pada masyarakat untuk mendapatkan peluang kerja yang lebih baik. Hal tersebut memberikan andil pada pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.

Sukirno (2006:89) menyatakan bahwa kesehatan adalah modal awal untuk menjalani kehidupan. Kesehatan memiliki peran penting dalam memerangi kemiskinan, karena dengan tubuh yang sehat seseorang akan dapat bekerja dengan baik untuk mempertahankan hidupnya. Penelitian yang dilakukan oleh Islami dan Anis (2019) menyatakan bahwa Tingkat kesehatan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan pada suatu daerah. Prananda *dkk* (2018) juga menyatakan bahwa Tingkat kesehatan mempengaruhi penurunan tingkat kemiskinan. Selain itu, tingkat kesehatan juga terindikasi memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Tingkat kesehatan optimal memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk bekerja maupun melakukan usaha pemenuhan kebutuhan dengan baik. Dengan demikian maka tingkat kesehatan yang optimal nantinya berpeluang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Todaro (2006:44) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang baik akan mencerminkan bahwa suatu daerah memiliki penduduk yang taraf hidupnya baik pula. Penelitian yang dilakukan oleh Handayani *dkk* (2016) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi memberikan pengaruh negatif terhadap

kemiskinan, karena dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat akan dapat mengurangi angka kemiskinan. Penelitian sejenis yang mengungkapkan hal senada disampaikan oleh Permadi (2018) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kemiskinan.



Gambar 1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan di Kepulauan Nusa Tenggara

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Jalur (*Path Analysis*)

Pengaruh UMR (X1), Tingkat Pendidikan(X2), dan Tingkat Kesehatan (X3) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y1)

Pengujian pengaruh UMR, Tingkat Pendidikan, dan Tingkat Kesehatan terhadap Pertumbuhan Ekonomi secara langsung yang dilakukan dengan menggunakan SPSS Versi 22.0, maka hasil regresi disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2 Hasil *Coefficients* pengaruh UMR, Tingkat Pendidikan, dan Tingkat Kesehatan terhadap Pertumbuhan Ekonomi

		Coefficients^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	-50.046	14.639		-3.419	.002
	UMR	3.305	1.106	.421	2.987	.005
	Tingkat Pendidikan	.088	.031	.402	2.863	.007
	Tingkat Kesehatan	.113	.041	.294	2.757	.009

Sumber: Lampiran 7

Berdasarkan hasil Tabel 2 menunjukkan bahwa hasil pengujian variabel UMR terhadap Pertumbuhan Ekonomi yang memiliki nilai signifikansi sebesar $0,005 < 0,05$ (nilai alpha), maka hal ini menyatakan bahwa UMR berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hal ini berarti setiap kenaikan UMR sebesar Rp. 1,00 menyebabkan kenaikan sebesar 0,421 persen pada Pertumbuhan Ekonomi.

Hasil pengujian variabel Tingkat Pendidikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi yang memiliki nilai signifikansi sebesar $0,007 < 0,05$ (nilai alpha), maka hal ini menyatakan bahwa Tingkat Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hal ini berarti setiap kenaikan Tingkat Pendidikan sebesar 1 persen menyebabkan kenaikan sebesar 0,402 persen pada Pertumbuhan Ekonomi.

Hasil pengujian variabel Tingkat Kesehatan terhadap Pertumbuhan Ekonomi yang memiliki nilai signifikansi sebesar $0,009 < 0,05$ (nilai alpha), maka hal ini menyatakan bahwa Tingkat Kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hal ini berarti setiap kenaikan Tingkat Kesehatan sebesar 1point menyebabkan kenaikan sebesar 0,294 persen pada Pertumbuhan Ekonomi. Model regresi 1 dapat disajikan:

$$e_1 = \sqrt{1 - R^2} = \sqrt{1 - 0,597} = 0,635$$

$$Y_1 = 0,421X_1 + 0,402X_2 + 0,294X_3$$

Pengaruh UMR (X1), Tingkat Pendidikan(X2), Tingkat Kesehatan (X3), dan Pertumbuhan Ekonomi (Y1) Terhadap Tingkat Kemiskinan (Y2)

Pengujian model 2 dilakukan untuk melihat pengaruh UMR, Tingkat Pendidikan, Tingkat Kesehatan, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap tingkat kemiskinan secara langsung yang dilakukan dengan menggunakan SPSS Versi 22.0, maka hasil regresi disajikan dalam Tabel 3.

Tabel 3 Hasil *Coefficients* pengaruh UMR, Tingkat Pendidikan, Tingkat Kesehatan, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	130.868	42.592		3.073	.004
UMR	-6.608	3.124	-.281	-2.115	.042
Tingkat Pendidikan	-.200	.086	-.306	-2.331	.026
Tingkat Kesehatan	-.388	.114	-.336	-3.398	.002
Pertumbuhan Ekonomi	-.906	.421	-.302	-2.149	.039

a. Dependent Variabel: Tingkat Kemiskinan

Sumber: Lampiran 7

Berdasarkan hasil Tabel 3 menunjukkan bahwa hasil pengujian variabel UMR terhadap Tingkat Kemiskinan yang memiliki nilai signifikansi sebesar $0,042 < 0,05$ (nilai alpha), maka hal ini menyatakan bahwa UMR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan. Hal ini berarti setiap kenaikan UMR sebesar Rp. 1,00 menyebabkan penurunan sebesar 0,281 persen pada Tingkat Kemiskinan.

Hasil pengujian variabel Tingkat Pendidikan terhadap Tingkat Kemiskinan yang memiliki nilai signifikansi sebesar $0,026 < 0,05$ (nilai alpha), maka hal ini menyatakan bahwa Tingkat Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan. Hal ini berarti setiap kenaikan Tingkat Pendidikan sebesar 1 persen menyebabkan penurunan sebesar 0,306 persen pada Tingkat Kemiskinan.

Hasil pengujian variabel Tingkat Kesehatan terhadap Tingkat Kemiskinan yang memiliki nilai signifikansi sebesar $0,002 < 0,05$ (nilai alpha), maka hal ini menyatakan bahwa Tingkat Kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan. Hal ini berarti setiap kenaikan Tingkat Kesehatan menyebabkan penurunan sebesar 0,336 persen pada Tingkat Kemiskinan.

Hasil pengujian variabel Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan yang memiliki nilai signifikansi sebesar $0,039 < 0,05$ (nilai alpha), maka hal ini menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan. Hal ini berarti setiap kenaikan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 1 persen menyebabkan penurunan sebesar 0,302 persen pada Tingkat Kemiskinan. Model regresi 2 dapat disajikan:

$$e_2 = \sqrt{1 - R^2} = \sqrt{1 - 0,721} = 0,528$$

$$Y_2 = -0,281X_1 - 0,306X_2 - 0,336X_3 - 0,302Y_1$$

Untuk memeriksa validitas model, terdapat indicator untuk melakukan pemeriksaan yaitu koefisien determinasi total yang dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} R^2m &= 1 - (e_1)^2(e_2)^2 \\ &= 1 - (0,635)^2(0,528)^2 \\ &= 1 - (0,403)(0,278) \\ &= 1 - 0,112 \\ &= 0,888 \end{aligned}$$

Keterangan:

R^2m = Koefisien determinasi total

e_1, e_2 = Nilai kekeliruan taksiran standar

Berdasarkan hasil perhitungan koefisien determinasi total, maka diperoleh bahwa keragaman data yang dapat dijelaskan oleh model adalah sebesar 0,888 persen atau dengan kata lain variasi tingkat kemiskinan di kepulauan Nusa Tenggara dipengaruhi UMR, tingkat Pendidikan, tingkat Kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi sebesar 88,8 persen dapat dijelaskan dalam model, sedangkan sisanya yaitu 11,2 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam model.

Pengaruh Langsung

Pengaruh Upah Minimum Regional Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai probabilitas sebesar $0,005 < 0,05$, hal tersebut berarti bahwa upah minimum regional berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengaruh meningkatnya upah minimum regional terhadap pertumbuhan ekonomi adalah semakin meningkatnya nilai upah minimum regional maka meningkatkan minat masyarakat untuk bekerja dan membuat usaha sehingga produksi dalam wilayah akan semakin meningkat. Hal tersebut memiliki kontribusi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kepulauan Nusa Tenggara. Peningkatan upah minimum regional diikuti dengan peningkatan minat

masyarakat dalam membangun usaha sehingga tingkat kreatifitas produk meningkat maka pertumbuhan ekonomi akan semakin meningkat.

Kebijakan penetapan upah minimum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 diarahkan untuk mencapai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) selain memberi jaminan pekerja/buruh penerima upah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Program pencapaian upah minimum terhadap Kebutuhan Hidup Layak (KHL) menunjukkan perbaikan nyata. Hal ini dimaksudkan bahwa pemenuhan kebutuhan hidup akan dicapai secara bertahap.

Setiap provinsi memiliki kebijakan atau nilai upah minimum regional yang berbeda-beda. Provinsi Bali memiliki nilai upah minimum regional paling rendah pada tahun 2009 yaitu sebesar Rp. 760.000 yang terus mengalami peningkatan dan pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp. 2.893.139 rupiah. Provinsi Nusa Tenggara memiliki nilai upah minimum regional terendah pada tahun 2009 yaitu sebesar Rp. 832.500 yang terus mengalami perubahan dan pada tahun 2018 menjadi Rp. 2.195.209. Pada Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki nilai upah minimum regional yaitu sebesar Rp. 725.000 yang terus mengalami perubahan dan pada tahun 2018 menjadi Rp. 2.069.196. dan pada Provinsi Maluku memiliki nilai upah minimum regional pada tahun 2009 yaitu sebesar Rp. 775.000 yang mengalami peningkatan dan pada tahun 2018 menjadi Rp. 2.518.027. Menurut data terlihat perbedaan nilai upah minimum regional pada tiap provinsi. Provinsi yang memiliki nilai upah minimum terendah pada tahun 2018 yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur dan yang memiliki nilai upah minimum regional pada tahun 2018 yaitu Provinsi Bali.

Tujuan dari penetapan upah minimum adalah untuk mewujudkan penghasilan yang layak bagi pekerja. Beberapa hal yang menjadi bahan pertimbangan termasuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja tanpa menaikkan produktifitas perusahaan dan kemajuannya, termasuk juga pertimbangan mengenai kondisi ekonomi secara umum (Anggadini, 2015).

Peningkatan upah minimum regional perlu ditingkatkan secara serentak di wilayah kepulauan Nusa Tenggara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan upah minimum regional telah dilakukan pada wilayah di kepulauan Nusa

Tenggara secara bertahap dan pada tiap tahun mengalami peningkatan secara fluktuasi. Hal tersebut mendukung langkah pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah kepulauan Nusa Tenggara.

Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai probabilitas sebesar $0,007 < 0,05$, hal ini berarti bahwa tingkat Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengaruh meningkatnya tingkat Pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi adalah semakin meningkatnya persentase tingkat Pendidikan maka dapat meningkatkan kreatifitas masyarakat dalam membuat suatu produk atau usaha yang yang dapat dikembangkan sehingga hal tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada wilayah kepulauan Nusa Tenggara. Peningkatan tingkat Pendidikan disertai peningkatan usaha-usaha kreativitas mikro oleh masyarakat wilayah sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Menurut Andrew E. Sikula dalam Maidoni *dkk* (2015) tingkat pendidikan adalah suatu proses jangka panjang yang menggunakan prosedur sistematis dan terorganisir, yang mana tenaga kerja manajerial mempelajari pengetahuan konseptual dan teoritis untuk tujuan-tujuan umum. Dengan demikian Hariandja menyatakan bahwa tingkat pendidikan seorang karyawan dapat meningkatkan daya saing perusahaan dan memperbaiki kinerja perusahaan. Pendidikan adalah aktivitas dan usaha untuk meningkatkan kepribadian dengan jalan membina potensi-potensi pribadinya, yaitu rohani (pikir, cipta, rasa, dan hati nurani) serta jasmani (panca indera dan keterampilan-keterampilan).

Peningkatan Pendidikan di wilayah kepulauan Nusa Tenggara telah dilakukan bertahap tiap tahun secara fluktuasi. Peningkatan tingkat Pendidikan diupayakan oleh pemerintah provinsi karena memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di setiap wilayah di kepulauan Nusa Tenggara.

Setiap provinsi memiliki kebijakan dalam melakukan kebijakan untuk pengaturan Pendidikannya. Pada Provinsi Bali memiliki persentase tingkat Pendidikan tertinggi pada tahun 2018 yaitu sebesar 73 persen. Pada Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki persentase tingkat Pendidikan tertinggi yaitu pada tahun 2018 sebesar 65,77

persen. Pada Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki persentase tingkat Pendidikan tertinggi pada tahun 2018 yaitu sebesar 53,68 persen. Dan pada Provinsi Maluku memiliki persentase tingkat Pendidikan tertinggi pada tahun 2018 yaitu sebesar 63,68 persen. Provinsi yang memiliki nilai persentase tingkat Pendidikan terbesar yaitu pada Provinsi Bali dan yang memiliki nilai persentase tingkat Pendidikan terendah yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Peningkatan yang terjadi di wilayah kepulauan Nusa Tenggara paling tinggi tingkat pendidikannya yaitu di wilayah Bali. Wilayah lainnya yang paling rendah tingkat pendidikannya yaitu daerah Nusa Tenggara Timur. Namun, peningkatan yang terjadi di setiap wilayah menandakan adanya upaya pemerintah dalam melaksanakan pemerataan Pendidikan pada masing-masing wilayah sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh Tingkat Kesehatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai probabilitas sebesar $0,009 < 0,05$, hal ini berarti bahwa tingkat Kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengaruh meningkatnya tingkat kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi adalah semakin meningkatnya persentase tingkat kesehatan maka dapat meningkatkan kegiatan usaha masyarakat dalam membuat suatu produk atau usaha yang yang dapat dikembangkan sehingga hal tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada wilayah kepulauan Nusa Tenggara. Peningkatan tingkat kesehatan disertai peningkatan pembangunan usaha-usaha dapat meningkatkan aktivitas ekonomi wilayah sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah kepulauan Nusa Tenggara.

Penelitian yang dilakukan oleh Prananda *dkk* (2018) menjelaskan intervensi untuk memperbaiki kesehatan dari pemerintah juga merupakan suatu alat kebijakan penting untuk mengurangi kemiskinan. Kesehatan menjadi ukuran kesejahteraan menggambarkan tingkat kesehatan masyarakat berhubungan dengan kualitas kehidupannya. Keadaan penduduk yang sehat menjadi salah satu modal bagi keberhasilan pembangunan bangsa karena dengan penduduk yang sehat, harapannya pembangunan yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar.

Setiap provinsi memiliki nilai persentase tingkat Kesehatan yang bervariasi, Provinsi Bali memiliki nilai persentase tingkat Kesehatan terbesar yaitu pada tahun 2010 yaitu sebesar 40,12 persen. Pada Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki nilai persentase tingkat Kesehatan terbesar yaitu pada tahun 2009 yaitu sebesar 39,59 persen. Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki nilai persentase tingkat Kesehatan terbesar yaitu pada tahun 2009 sebesar 47,23 persen. Dan pada Provinsi Maluku nilai persentase tingkat Kesehatan terbesar yaitu pada tahun 2009 yaitu 36,32 persen. Berdasarkan data diperoleh daerah dengan tingkat Kesehatan terbesar yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi dengan nilai persentase tingkat Kesehatan terendah yaitu Provinsi Maluku.

Tingkat Kesehatan pada wilayah kepulauan Nusa Tenggara mengalami perubahan yang beragam. Daerah Bali mengalami perubahan yang bervariasi pada setiap tahunnya dalam hal tingkat Kesehatan. Begitu pula yang terjadi di daerah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku. Perubahan yang bervariasi ini menandakan bahwa tingkat Kesehatan yang ada wilayah kepulauan Nusa Tenggara perlu mendapatkan perhatian khusus karena masing-masing terbelakang. Hal ini perlu diperhatikan karena, peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat terjadi dengan diiringi oleh peningkatan tingkat Kesehatan pada wilayah kepulauan Nusa Tenggara. Sehingga peningkatan tingkat kesehatannya perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah masing-masing provinsi.

Pengaruh Upah Minimum Regional Terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai probabilitas sebesar $0,042 < 0,05$, hal ini berarti bahwa upah minimum regional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Pengaruh meningkatnya upah minimum regional terhadap tingkat kemiskinan adalah semakin meningkatnya nilai upah minimum regional maka meningkatkan minat masyarakat untuk bekerja dan membuat usaha sehingga produksi dalam wilayah akan semakin meningkat. Hal tersebut memiliki kontribusi yang besar dalam menurunkan tingkat kemiskinan di kepulauan Nusa Tenggara. Peningkatan upah minimum regional diikuti dengan peningkatan minat masyarakat dalam membangun usaha sehingga tingkat kreatifitas produk meningkat maka tingkat kemiskinan akan semakin menurun.

Penelitian yang dilakukan oleh Zainuddin (2015) menyatakan bahwa Upah Minimum Regional (UMR) berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini dikarenakan, tingginya kebutuhan sehari-hari dan harga kebutuhan pokok tidak dapat ditutupi oleh UMR sehingga masyarakat masih mengalami kesusahan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Peningkatan upah minimum regional yang telah dilakukan di masing-masing wilayah di Kepulauan Nusa Tenggara perlu diperhatikan agar selalu konsisten dalam peningkatannya. Hal ini berpengaruh pada tingkat kemiskinan yang ada di wilayah Kepulauan Nusa Tenggara. Wilayah dengan tingkat kemiskinan paling tinggi yaitu di daerah Nusa Tenggara Barat sehingga perlu diperhatikan peningkatan upah minimum regional agar dapat memberikan pengaruh pada tingkat kemiskinan agar semakin menurun. Wilayah lainnya yaitu Bali, NTT, dan Maluku juga perlu mendapatkan perhatian agar tingkat kemiskinannya tiap tahun mengalami penurunan dengan meningkatkan upah minimum regional.

Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai probabilitas sebesar $0,026 < 0,05$, hal ini berarti bahwa tingkat pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Pengaruh meningkatnya tingkat Pendidikan terhadap tingkat kemiskinan adalah semakin meningkatnya persentase tingkat Pendidikan maka dapat meningkatkan kreatifitas masyarakat dalam membuat suatu produk atau usaha yang yang dapat dikembangkan sehingga hal tersebut dapat menurunkan tingkat kemiskinan pada wilayah kepulauan Nusa Tenggara. Peningkatan tingkat Pendidikan disertai peningkatan usaha-usaha kreativitas mikro oleh masyarakat wilayah sehingga menurunkan tingkat kemiskinan.

Azizah *dkk* (2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan. Semakin tinggi angka pendidikan terbuka, menandakan makin banyak penduduk usia produktif yang tidak memiliki pekerjaan.

Tingkat kemiskinan di wilayah Kepulauan Nusa Tenggara termasuk masih tinggi sehingga perlu dilakukan upaya agar terjadi penurunan. Hal tersebut salah satunya dapat

dilakukan dengan melakukan peningkatan pada tingkat Pendidikan pada masing-masing wilayah. Dengan peningkatan tingkat Pendidikan maka dapat menurunkan nilai kemiskinan yang ada di wilayah Kepulauan Nusa Tenggara yang tiap tahun masing mengalami perubahan yang bervariasi.

Pengaruh Tingkat Kesehatan Terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai probabilitas sebesar $0,002 < 0,05$, hal ini berarti bahwa tingkat Kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Pengaruh meningkatnya tingkat kesehatan terhadap tingkat kemiskinan adalah semakin meningkatnya persentase tingkat kesehatan maka dapat meningkatkan kegiatan usaha masyarakat dalam membuat suatu produk atau usaha yang yang dapat dikembangkan sehingga hal tersebut dapat menurunkan tingkat kemiskinan pada wilayah kepulauan Nusa Tenggara. Peningkatan tingkat kesehatan disertai peningkatan pembangunan usaha-usaha dapat meningkatkan aktivitas ekonomi wilayah sehingga dapat menurunkan tingkat kemiskinan wilayah kepulauan Nusa Tenggara.

Penelitian yang dilakukan oleh Islami dan Anis (2019) menyatakan bahwa Tingkat kesehatan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan pada suatu daerah. Prananda *dkk* (2018) juga menyatakan bahwa Tingkat kesehatan mempengaruhi penurunan tingkat kemiskinan. Selain itu, tingkat kesehatan juga terindikasi memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Tingkat Kesehatan yang ada di masing-masing daerah yang masih rendah perlu dilakukan peningkatan agar memberikan dampak pada penurunan tingkat kemiskinan yang ada di wilayah kepulauan Kepulauan Nusa Tenggara. Hal tersebut telah terlihat pada variasi perubahan pada tingkat kemiskinan yang menandakan adanya upaya dalam penurunan tingkat kemiskinan dengan meningkatkan tingkat Kesehatan di wilayah Kepulauan Nusa Tenggara.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai probabilitas sebesar $0,039 < 0,05$, hal ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Pengaruh meningkatnya pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat

kemiskinan adalah semakin meningkatnya persentase pertumbuhan ekonomi maka dapat meningkatkan kegiatan usaha dalam wilayah sehingga dapat meningkatkan pendapatan wilayah hal ini berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan di wilayah kepulauan Nusa Tenggara. Peningkatan pertumbuhan ekonomi diikuti dengan pertumbuhan usaha-usaha mikro masyarakat serta aktivitas lainnya yang mengakibatkan pendapatan wilayah semakin meningkat sehingga tingkat kemiskinan di wilayah kepulauan Nusa Tenggara mengalami penurunan.

Penelitian yang dilakukan oleh Handayani *dkk* (2016) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh terhadap kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi memberikan pengaruh negatif terhadap kemiskinan, karena dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat akan dapat mengurangi angka kemiskinan.

Setiap provinsi memiliki nilai pertumbuhan ekonomi yang bervariasi bergantung wilayah masing-masing. Provinsi Bali memiliki nilai persentase pertumbuhan ekonomi terbesar terjadi pada tahun 2012 dan 2013 yaitu sebesar 6,96 persen. Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki nilai persentase pertumbuhan ekonomi terbesar pada tahun 2015. Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki nilai persentase pertumbuhan ekonomi terbesar pada tahun 2012 yaitu sebesar 5,67 persen. Dan pada Provinsi Maluku memiliki nilai persentase pertumbuhan ekonomi terbesar yaitu pada tahun 2012 sebesar 7,16. Provinsi dengan nilai pertumbuhan ekonomi terbesar terjadi pada Provinsi Maluku dan Provinsi terendah yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di wilayah kepulauan Kepulauan Nusa Tenggara masih dikategorikan rendah. Hal ini dikarenakan perubahan pertumbuhan ekonomi masih sangat bervariasi dan tidak konsisten dalam peningkatannya sehingga masih digolongkan rendah. Masih rendahnya pertumbuhan ekonomi juga mengakibatkan masing-masing tingkat kemiskinan yang terjadi di wilayah Kepulauan Nusa Tenggara. Salah satunya di daerah Nusa Tenggara Barat yang pertumbuhan ekonominya paling rendah sehingga daerah tersebut menjadi daerah dengan tingkat kemiskinannya paling tinggi. Hal ini perlu diperhatikan pada setiap wilayah agar meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga memberikan dampak pada penurunan tingkat kemiskinan di wilayah tersebut.

Pengaruh tidak langsung variabel

Pengaruh Tidak Langsung Upah Minimum Regional Terhadap Tingkat Kemiskinan Melalui Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai z hitung sebesar $-1,746 < 1,96$, hal tersebut berarti bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memediasi hubungan UMR terhadap tingkat kemiskinan. Peningkatan upah minimum regional tidak memiliki hubungan secara tidak langsung dengan pertumbuhan ekonomi dalam peningkatan maupun penurunan tingkat kemiskinan di wilayah kepulauan Nusa Tenggara. Hal ini berarti bahwa peningkatan maupun penurunan pertumbuhan ekonomi tidak mempengaruhi hubungan antara upah minimum regional dengan tingkat kemiskinan.

Upah minimum regional bergantung terhadap kemampuan daerah dalam mengembangkan perekonomian sehingga bisa meningkatkan nilai upah minimalnya. Upah minimum regional berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi tetapi tidak memberikan pengaruh terhadap tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tidak berkaitan dengan bagaimana upah minimum regional tersebut dapat menurunkan tingkat kemiskinan.

Perubahan yang terjadi pada pertumbuhan ekonomi tidak serta merta memberikan pengaruh pada hubungan pengaruh upah minimum regional dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Hal tersebut terlihat bahwa di wilayah Kepulauan Nusa Tenggara yang pertumbuhan ekonominya masing tergolong rendah tetapi peningkatan UMR dilakukan secara bertahap oleh pemerintah guna menurunkan kemiskinan. Setiap wilayah mengalami peningkatan pada UMR meskipun pertumbuhan ekonominya masih rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memberikan pengaruh secara tidak langsung pada pengaruh UMR terhadap penurunan tingkat kemiskinan.

Pengaruh Tidak Langsung Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan Melalui Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai z hitung sebesar $-2,847 < 1,96$, hal tersebut berarti bahwa pertumbuhan ekonomi memediasi hubungan tingkat pendidikan terhadap tingkat kemiskinan. Peningkatan tingkat Pendidikan secara tidak langsung

menurunkan tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi. Pengaruh yang ditimbulkan akibat meningkatnya tingkat Pendidikan adalah meningkatnya perkembangan aktivitas usaha yang dibangun dengan ide-ide inovatif sehingga pendapatan wilayah semakin meningkat. Peningkatan usaha yang terjadi mengakibatkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan pada wilayah kepulauan Nusa Tenggara.

Pertumbuhan ekonomi memberikan dampak pada aktivitas masyarakat salah satunya dapat meningkatkan tingkat Pendidikan dengan hal itu semakin meningkatkan usaha yang ada di daerah sehingga pendapatan daerah semakin meningkat maka dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi memberikan pengaruh bagaimana tingkat Pendidikan dapat menurunkan tingkat kemiskinan dalam suatu daerah.

Tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah memberikan dampak pada rendahnya tingkat Pendidikan. Hal tersebut terlihat pada tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah pada setiap daerah di wilayah Kepulauan Nusa Tenggara memberikan dampak masih rendahnya tingkat Pendidikan sehingga berpengaruh pada penurunan tingkat kemiskinan yang tidak bisa dilakukan secara konsisten. Hal ini mengindikasikan bahwa perubahan pertumbuhan ekonomi memberikan dampak pada perubahan tingkat Pendidikan sehingga mampu menurunkan tingkat kemiskinan di setiap wilayah.

Pengaruh Tidak Langsung Tingkat Kesehatan Terhadap Tingkat Kemiskinan Melalui Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai z hitung sebesar $-1,706 < 1,96$, hal tersebut berarti bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memediasi hubungan tingkat kesehatan terhadap tingkat kemiskinan. Peningkatan tingkat kesehatan tidak memiliki hubungan secara tidak langsung dengan pertumbuhan ekonomi dalam peningkatan maupun penurunan tingkat kemiskinan di wilayah kepulauan Nusa Tenggara. Hal ini berarti bahwa peningkatan maupun penurunan pertumbuhan ekonomi tidak mempengaruhi hubungan antara tingkat kesehatan dengan tingkat kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi tidak memberikan pengaruh tidak langsung terhadap tingkat Kesehatan dengan tingkat kemiskinan. Hal ini dikarenakan pertumbuhan

ekonomi tidak serta merta memberikan dampak bahwa tingkat kesehatan masyarakatnya akan meningkat sehingga meningkatkan pendapatan daerah. Hal tersebut tidak pasti karena Kesehatan masyarakat juga dipengaruhi oleh lingkungan sehingga pertumbuhan daerah tidak serta merta memberikan pengaruh terhadap tingkat Kesehatan yang mempengaruhi tingkat kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi yang masih tergolong rendah tidak serta merta memberikan pengaruh pada rendahnya tingkat Kesehatan masyarakat di wilayah Kepulauan Nusa Tenggara. Rendahnya pertumbuhan ekonomi pada masing-masing daerah tidak menjadikan tingkat kesehatannya rendah. Terlihat pada tingkat Kesehatan wilayah Kepulauan Nusa Tenggara yang tingkat pertumbuhan ekonominya masih rendah tetapi tingkat kesehatannya masih tergolong tinggi sehingga mampu memberikan pengaruh pada penurunan tingkat kemiskinan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memberikan pengaruh tidak langsung pada tingkat Kesehatan terhadap tingkat kemiskinan.

SIMPULAN

1. Upah minimum regional, tingkat Pendidikan, dan tingkat Kesehatan berpengaruh langsung positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah kepulauan Nusa Tenggara.
2. Upah minimum regional, tingkat Pendidikan, tingkat Kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh langsung negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di wilayah kepulauan Nusa Tenggara.
3. Tingkat Pendidikan berpengaruh tidak langsung terhadap tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi sehingga pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening. Upah minimum regional dan tingkat Kesehatan tidak berpengaruh tidak langsung terhadap tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan pertumbuhan ekonomi bukan sebagai variabel intervening.

SARAN

- 1) Diharapkan pemerintah provinsi pada setiap wilayah di kepulauan Nusa Tenggara memperhatikan pengeluaran daerah untuk fokus pada pengembangan usaha masyarakat dengan memberikan upah minimum regional

yang sesuai sehingga aktivitas ekonomi dapat berjalan dengan baik dan mengakibatkan peningkatan pada pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mendorong penurunan tingkat kemiskinan pada daerah kepulauan Nusa Tenggara.

- 2) Diharapkan pemerintah provinsi pada setiap wilayah di kepulauan Nusa Tenggara memperhatikan Pendidikan masyarakatnya yang memberikan perhatian lebih dalam kegiatan Pendidikan. Hal ini dirasa sangat penting kontribusinya sebagai modal sumber daya manusia yang dapat meningkatkan aktivitas ekonomi yang berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan pada daerah kepulauan Nusa Tenggara.
- 3) Diharapkan pemerintah provinsi pada setiap wilayah di kepulauan Nusa Tenggara memperhatikan jaminan Kesehatan bagi setiap warganya agar setiap warga dapat menjalankan kegiatan usaha ekonomi dengan lancar. Hal ini memberikan dampak bagi meningkatnya pendapatan daerah sehingga tingkat kemiskinan akan menurun.
- 4) Diharapkan pemerintah provinsi pada setiap wilayah di kepulauan Nusa Tenggara memperhatikan tingkat pertumbuhan ekonomi dengan mengatur aktivitas ekonomi agar menjadi lebih aktif sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah. Hal ini tentunya dapat menurunkan tingkat kemiskinan daerah kepulauan Nusa Tenggara.
- 5) Diharapkan pemerintah provinsi pada setiap wilayah di kepulauan Nusa Tenggara memperhatikan pertumbuhan ekonomi sehingga dapat memberikan pengaruh terhadap tingkat Pendidikan sehingga dapat memberikan SDM yang mumpuni dalam meningkatkan pendapatan dan dapat menurunkan tingkat kemiskinan.
- 6) Diharapkan pemerintah provinsi pada setiap wilayah di kepulauan Nusa Tenggara memahami pertumbuhan ekonomi tidak serta merta dapat meningkatkan pengaruh upah minimum regional sehingga menurunkan tingkat kemiskinan. Hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan usaha-usaha yang dilakukan masyarakat sehingga dapat memperhatikan bagaimana upah minimum yang berlaku di daerah.
- 7) Diharapkan pemerintah provinsi pada setiap wilayah di kepulauan Nusa Tenggara memahami bahwa pertumbuhan ekonomi tidak serta merta mempengaruhi hubungan tingkat Kesehatan terhadap tingkat kemiskinan. Tingkat Kesehatan bergantung pada bagaimana kondisi tubuh seseorang yang dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Sehingga hal tersebut tidak bergantung bagaimana pertumbuhan

ekonomi suatu daerah. Sehingga yang perlu diperhatikan bagaimana lingkungan masyarakat sehingga mereka dapat menjalankan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dan menurunkan tingkat kemiskinan.

REFERENSI

- Aswicahyono, H., & Hill, H. (2014). Survey of recent developments. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 50(3), 319-346.
- Atkinson & Leventi. 2017. Reducing poverty and inequality through tax-benefit reform and the minimum wage: the UK as a case-study. *Journal Econ Inequal.* Volume 10 Issue 1. 375–395.
- Azizah, 2018. Pengaruh Pendidikan, Pendapatan Perkapita Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi.* Volume 2. (1). 156-160.
- Azizah, Sidarti, & Kusuma. 2018. Pengaruh Pendidikan, Tingkat pendidikan Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi.* Volume 2. Nomor 1. 167 – 180.
- Belhadj. 2014. Employment measure in developing countries via minimum wage and poverty new fuzzy approach. *OP Search.* Volume 52 Nomor 2. 1-26.
- Dama, Lopian, & Sumual. 2016. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (Pendapatan Regional) Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kota Manado (Tahun 2005-2014). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi.* Volume 16 No. 03. 549-561.
- Damuri & Day. 2015. Survey Of Recent Developments. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 51, No. 1. 3-27.
- Engida, Dereje, Worku, & Yimer. 2017. The major bottlenecks of micro and small scale enterprises' growth in Ethiopia: An econometric analysis. *PEP Papper.* Volume 19 Issue 1. 10-22.
- Faddilah, Sukiman, & Dewi. 2016. Analisis Pengaruh Pendapatan Per Kapita, Tingkat pendidikan, Ipm dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2009-2013. *Jurnal Eko Regional.* Volume 11. Nomor 1. 18-26.
- Fitri & Kaluge. 2017. Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi.* Volume 15 Nomor 2. 130-136.
- Frans, Rahayu, & Mahardika. 2017. The Influence Of Local Government Revenue, Percapita Income, Education Level On Level Poverty (Empiric Study On City In West Java Province During 2011-2015). *Proceeding of Management : Vol.4, No.2.* 1666-1671.
- Gindling. 2018. Does increasing the minimum wage reduce poverty in developing countries?. *World of Labor.* Volume 56 Issue 2. 313-331.
- Hartanto & Masjkuri. 2017. Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan, Upah Minimum Dan Produk Domestik Regional Bruto (Pendapatan Regional) Terhadap Jumlah Pendidikan Di Kabupaten Dan Kotaprovinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan.* Volume 2 Nomor 1. 21-30.

- Hukom, A. (2015). Hubungan Ketenagakerjaan dan Perubahan Struktur Ekonomi terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 7(2), 120–129.
- Isa, Arham, & Dai. 2019. Effects of Capital Expenditures, Development Index and Unemployment on Poverty in Gorontalo Province. *JEJ*. Volume 1 Issue 1. 1-10.
- Islami & Anis. 2019. Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi*. Volume 1 Nomor 3. 939 – 948.
- Jekaterina, Silvia & Lilas. 2016. The Effects Of Reform Scenarios For Unemployment Benefits And Social Assistance On Work Incentives And Poverty In Lithuania. *Economic Journal*. Volume 34 Issue 1. 6-45.
- Kadafi & Sudrahman. 2018. Implikasi Dana Desa Yang Diterima Desa Tertinggal Per Kabupaten/Kota Terhadap Kemiskinan Dan Tingkat kesehatan: Bukti Empiris Di Indonesia. *SNITT- Politeknik Negeri Balikpapan*. Volume 1 Nomor 1. 1-8.
- Kertiasih. 2017. Pengaruh Tingkat Inflasi dan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Upah Minimum Regional (UMR) Di Provinsi Bali Pada Tahun 2008-2015. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*. Volume 9 No.1. 36-45.
- Khumairoh, Aida, Qomariah & Nasir. 2017. The Influence Of Economy Growth And Inflation Towards Poverty In Indonesia 2007-2016. *Economic journal*. Volume 1 Issue 1. 105-115.
- Komro, Melvin, Livingston, Markowitz, Alexander, & Wagenaar. 2016. The Effect of an Increased Minimum Wage on Infant Mortality and Birth Weight. *AJPH*. Volume 106. Nomor 8. 1514-1516.
- McArthur & Revees. 2019. The Rethoric of Ressection: How British Newspaper talk about poor. *Forthcoming in Sociology*. Volume 53 Issue 6. 1200-1203.
- Muda, Koleangan, & Kalangi. 2019. Pengaruh Tingkat kesehatan, Tingkat Pendidikan Dan Pengeluaran Perkapita Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sulawesi Utara Pada Tahun 2003-2017. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Volume 19 No. 01. 1-12.
- Permadi. 2018. Growth, Inequality, and Poverty: An Analysis of Pro-Poor Growth in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. Volume 11 Nomor 2. 216-233.
- Ramirez, Penza, & Mogenzen. 2015. The Effect of Minimum Wage on Poverty. *Journal Georgia Institute of Technology*. Volume 1 Issue 1. 1-20.
- Ratha. 2013. The impact of economic growth to poverty reduction. *MPI*. Volume 1 Issue 8. 1-14.
- Rauf, Hasmin, & Yahya. 2019. Competitiveness Of The Area And The Effect Of Product Domestic Bruto Perkapita And Human Development Index On Poverty Level In Teluk Bintuni District West Papua Province. *YUME : Journal of Management*. Volume 2 No. 1. 1-15.
- Rejekiningsih, T. W. (2012). Konsentrasi Ekspor Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 5(2). 108-119

- Samputra & Munandar. 2019. Korupsi, Indikator Makro Ekonomi, dan IPM terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. Volume 12 Nomor 1. 1-107.
- Shah, Somroo, & Mirjat. 2019. An Investigation of the Impact of Poverty and Unemployment on Criminal Behaviour among Youths: An Empirical Approach. *Pakistan Journal of Criminology*. Vol. 11, Issue 01. 54-67.
- Vasan, Alcantara, Nefertari, Ruan, & Baker. 2015. Geography is Destiny: Spatial Correlations in Poverty and Educational Attainment in a New Mexico School District. *Journal of Economic*. Volume 33 Issue 2. 155-163.
- Vicente & Aniceto. 2016. The Impact of Legal Minimum Wages on Employment, Income, and Poverty Incidence in the Philippines. *Discussion Papper*. Volume 63 Issue 2. 1-11.
- Wardhana & Ihle. 2017. Agro-Clusters And Rural Poverty: A Spatial Perspective For West Java. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 53, No. 2. 86-161.
- Wulandari, A., Dwi, C., & Wardhono, A. (2015). Studi Kesenambungan Fiskal Pada Variabel Makro Ekonomi Indonesia: Analisis VAR. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 8(2). 113-121.